

Tajuk Khusus

Makan Bergizi Gratis (MBG)

(Madaharsa Wicaksana, Tofan Wigati)

Pemerintah Indonesia berusaha mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dengan mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuan utamanya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM dianggap krusial karena berhubungan erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai target ini, pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, termasuk penguatan gizi anak sekolah, agar Indonesia bisa keluar dari kategori negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama. Fokus utamanya adalah memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan hal ini, kebijakan fiskal jangka menengah diarahkan pada beberapa upaya, seperti meningkatkan akses pendidikan di semua jenjang, terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, pemerataan kualitas pendidikan antar daerah, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, dan memperkuat hubungan antara pendidikan dengan pasar tenaga kerja.

Peningkatan kualitas pendidikan harus diiringi dengan peningkatan kesehatan di setiap tahap kehidupan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan gizi masyarakat mulai dari masa kehamilan hingga usia sekolah. Upaya ini diharapkan dapat membantu anak-anak Indonesia menyerap ilmu pengetahuan dengan baik dan menjadi individu yang produktif. Strategi ini sejalan dengan kebijakan penguatan kesejahteraan melalui pendidikan bermutu dan berdaya saing, termasuk program unggulan seperti *link and match* dan peningkatan gizi anak sekolah.

Untuk mendukung peningkatan gizi anak-anak, pemerintah merancang Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan menyediakan makanan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil/menyusui yang berisiko tinggi melahirkan anak dengan *stunting*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sejak dini dan mendukung mereka dalam proses pembelajaran. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, mengurangi angka absensi dan putus sekolah, dan memberikan dampak positif pada kesehatan dan prestasi akademis siswa.

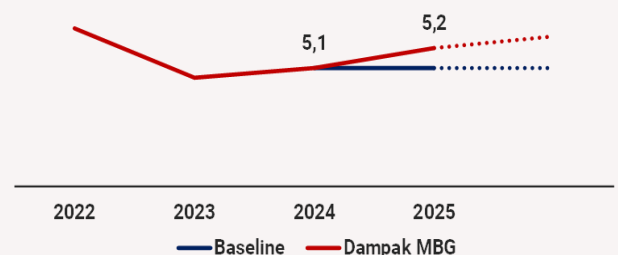
Program MBG akan melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia makanan bergizi bagi siswa. Selain sebagai upaya peningkatan kesehatan dan kualitas SDM,

program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,0 triliun untuk melaksanakan program ini pada tahun 2025. Dengan pelaksanaan program ini, diperkirakan sekitar 0,82 juta tenaga kerja akan terserap dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10 persen pada tahun 2025.

Tren global menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi di sekolah telah memberikan dampak positif yang signifikan. Pada tahun 2022, program serupa telah menjangkau hampir 418 juta anak di seluruh dunia, dengan berbagai bentuk implementasi, seperti program makan siang di Amerika Serikat dan India, serta program pemberian makanan dari sumber lokal di Afrika. Pemberian makan bergizi di sekolah terbukti dapat meningkatkan kehadiran dan partisipasi siswa, mengurangi malnutrisi dan *stunting*, serta membantu mengendalikan risiko obesitas dan diabetes sejak dini di beberapa negara maju.

Dengan adanya Program MBG, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan SDM yang produktif dan berdaya saing. Selain itu, penggunaan sumber pangan lokal diharapkan dapat mengurangi rantai distribusi dan jejak karbon, serta memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Pada akhirnya, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia.

Grafik Proyeksi Dampak Program MBG terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%)



REDAKSI

Direktorat Penyusunan APBN
Gedung Sutikno Slamet Lt. 10
Jl. DR Wahidin No. 1
Jakarta Pusat
Telp: (021) 3849315
Email:
penyusunan.apbn@gmail.com

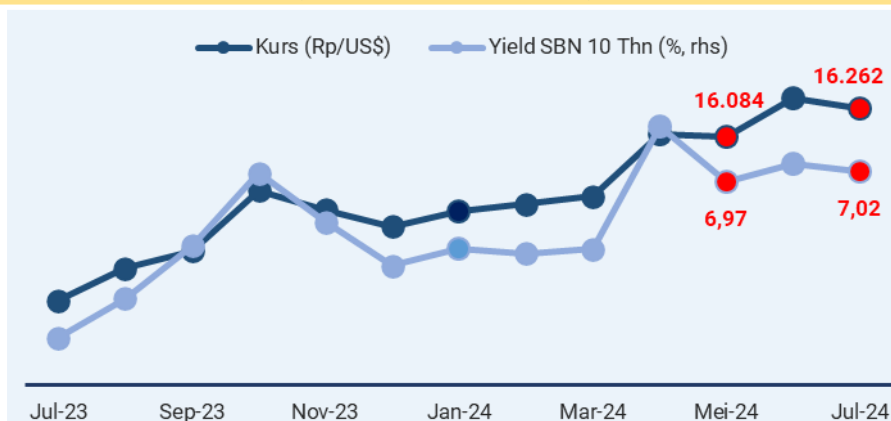


Realisasi APBN

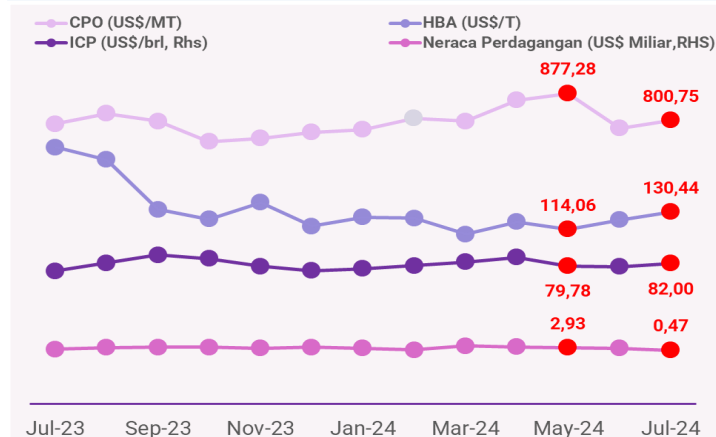
s.d. 31 Juli 2024

Uraian (triliun rupiah)	2023		2024				
	Growth y-o-y (%)	APBN	Real s.d. 31 Juli	% thd APBN	Growth y-o-y (%)	Growth m-o-m (%)	Growth m-t-m (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	▲ 4,1	2.802,3	1.545,4	55,1	▼ (4,3)	▲ 8,4	▲ 13,9
I. Penerimaan Perpajakan	▲ 3,7	2.309,9	1.199,7	51,9	▼ (4,7)	▲ 12,1	▲ 8,3
1. Penerimaan Pajak	▲ 7,8	1.988,9	1.045,3	52,6	▼ (5,8)	▲ 9,1	▲ 13,5
2. Kepabeanan & Cukai	▼ (19,1)	321,0	154,4	48,1	▲ 3,1	▲ 40,6	▼ (19,5)
II. PNBP	▲ 5,5	492,0	338,0	68,7	▼ (5,0)	▼ (8,0)	▲ 33,7
III. Hibah	▼ (6,5)	0,4	7,7	1.791,9	▲ 2.291,2	▲ 2.398,2	▲ 116,0
B. BELANJA NEGARA	▲ 1,2	3.325,1	1.638,8	49,3	▲ 12,2	▲ 12,0	▼ (4,8)
I. Belanja Pemerintah Pusat	▼ (1,0)	2.467,5	1.170,8	47,5	▲ 14,7	▲ 30,1	▼ (0,4)
1. Belanja K/L	▲ 0,5	1.090,8	588,7	54,0	▲ 19,4	▲ 33,8	▲ 2,7
2. Belanja non-K/L	▼ (2,4)	1.376,7	582,1	42,3	▲ 10,4	▲ 25,2	▼ (4,5)
II. Transfer Ke Daerah	▲ 6,6	857,6	468,0	54,6	▲ 6,1	▼ (17,4)	▼ (14,3)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	▲ 24,6	(25,5)	179,3	(703,2)	▼ (54,6)	▼ (21,7)	▼ (177,6)
D. SURPLUS/(DEFISIT)	▲ 44,2	(522,8)	(93,4)	17,9	▼ (160,8)	▲ 105,1	▼ (71,1)
% thd PDB		(2,29)	(0,41)				
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	▼ (16,7)	522,8	217,0	41,5	▲ 31,9	▲ 79,4	▼ (41,2)

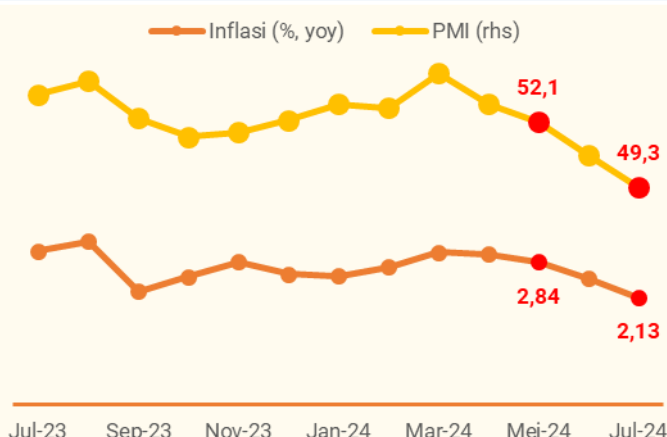
Indikator Utama (Leading Indicator) yang Berpengaruh terhadap Postur



Sektor Keuangan mengalami tekanan cukup besar pada bulan Juli 2024. Tekanan terhadap Rupiah dan yield SBN dipengaruhi ketidakpastian *stance* the Fed, tekanan fiskal AS, dinamika geopolitik global, serta kinerja ekonomi mitra dagang utama. Namun terdapat potensi perbaikan apabila The Fed melonggarkan *stance* kebijakannya. Pemerintah bersama dengan BI akan terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.



Sektor Eksternal dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dunia yang menghadapi stagnasi. ICP Juli 2024 mengalami kenaikan dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan kebijakan produksi dari OPEC+. Lesunya pertumbuhan ekonomi dunia berpengaruh terhadap komoditas utama lainnya seperti batubara dan CPO. Fluktuasi harga komoditas global juga berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia yang meski masih mencatatkan surplus, tapi mengalami penurunan pada Juli 2024.



Sektor Riil masih cukup resilien dalam menghadapi tekanan global. Hal ini terlihat dari tingkat inflasi Juli 2024 yang terjaga dan menurun sehingga mengurangi tekanan *imported inflation*. Di lain sisi PMI manufaktur Indonesia di bulan Juli 2024 mengalami penurunan menunjukkan kontraksi sektor manufaktur akibat penurunan permintaan dan produksi serta kebijakan ekonomi yang kurang mendukung akibat adanya relaksasi impor.

PENDAPATAN NEGARA

Kinerja Pendapatan Negara sampai dengan 31 Juli tahun 2024 berkontraksi 4,3 persen dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, volatilitas harga komoditas, serta implementasi kebijakan pemerintah.

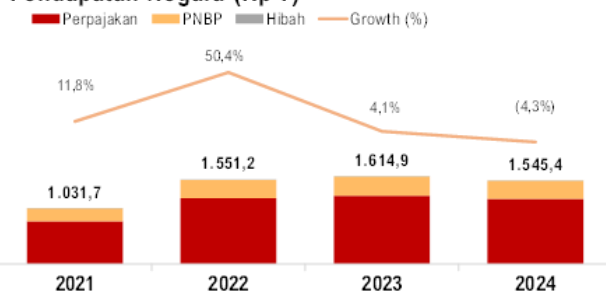
Kinerja Perpajakan Mulai Menunjukkan Perbaikan Terutama di Sektor Perdagangan

Penerimaan perpajakan sebagai sumber penerimaan terbesar mencapai Rp1.199,7 triliun yang ditopang dari pajak maupun kepabeanan dan cukai. Meskipun penerimaan perpajakan masih berkontraksi, namun penerimaan pajak terkait dengan transaksi tahun berjalan mengalami pertumbuhan, yaitu: PPh Pasal 21 didorong peningkatan utilisasi dan tingkat upah tenaga kerja (naker); PPh Final (deposito, konstruksi, dan sewa tanah/bangunan) ditopang kenaikan aktivitas transaksi; serta PPN DN bruto disebabkan oleh terjaganya tingkat konsumsi serta tekanan restitusi yang mulai menurun. Secara total, pajak masih berkontraksi 5,8 persen (lebih baik dari akumulasi bulan sebelumnya) yang dipengaruhi oleh penurunan laba tahun sebelumnya akibat moderasi harga komoditas tahun 2023 dan restitusi.

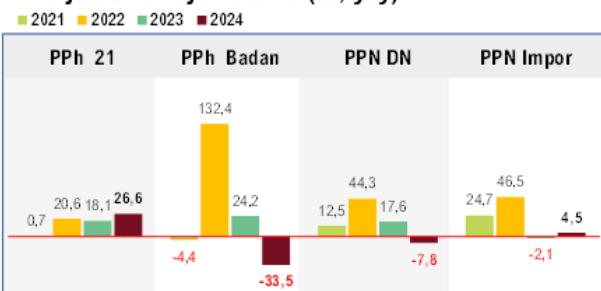
Sementara itu, **Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mampu tumbuh 3,1 persen** (lebih baik dari akumulasi bulan sebelumnya) yang dipengaruhi terutama peningkatan produksi rokok diiringi dengan upaya pengendalian rokok ilegal, kebijakan relaksasi ekspor mineral, serta nilai impor, dan kurs USD terhadap rupiah.

Kinerja perpajakan secara detail dapat dilihat pada dashboard: <https://bit.ly/DashboardPerpajakanLentera>

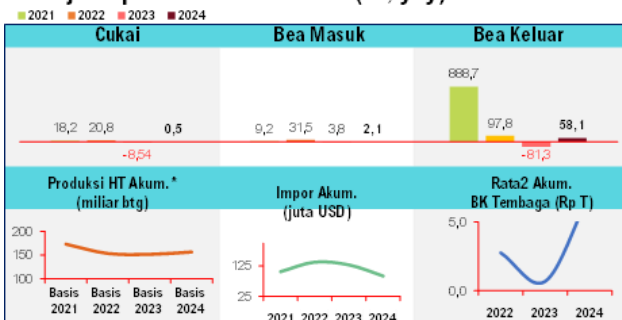
Pendapatan Negara (Rp T)



Kinerja Jenis Pajak Utama (% yoy)



Kinerja Kepabeanan dan Cukai (% yoy)



* Basis produksi adalah perhitungan November tahun sebelumnya dan pada periode berjalan

Kinerja PNBP s.d. 31 Juli 2024 Masih Menghadapi Tekanan pada Pendapatan SDA

Realisasi PNBP sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp338,0 triliun (68,7% dari APBN 2024), berkontraksi 5,0% (yoy). Perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan SDA yang berkontraksi hingga 15,0% (yoy) dipengaruhi oleh turunnya *lifting* minyak bumi serta moderasi Harga Batubara Acuan (HBA), meskipun Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan Pendapatan BLU mengalami peningkatan.

Realisasi Pendapatan SDA Migas mencapai Rp64,5 triliun (58,6% dari APBN 2024), berkontraksi 6,4% (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya *lifting* dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode Januari-Juni 2024, rata-rata *lifting* minyak bumi sebesar 564,1 ribu barel/hari (2023: 603,0 ribu barel/hari) dan rata-rata *lifting* gas bumi mencapai sebesar 938,3 ribu barel/hari (2023: 946,4 ribu barel/hari). Penurunan *lifting* ini disebabkan oleh penurunan tingkat alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Sementara itu, rata-rata ICP periode Januari-Juli 2024 mengalami peningkatan yaitu mencapai US\$81,3/barel (2023: US\$75,2/barel)

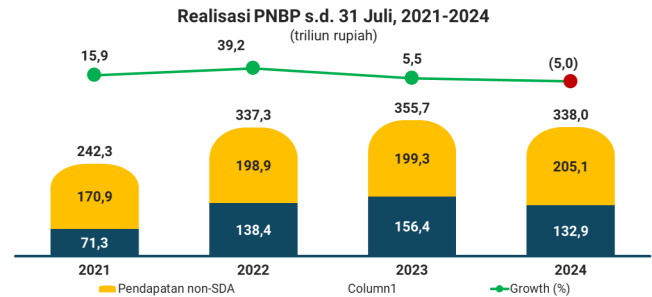
Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp68,4 triliun (70,1% dari APBN 2024), berkontraksi 21,8% (yoy). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan SDA Pertambangan Minerba yang berkontraksi 24,0% (yoy) terutama disebabkan oleh turunnya kinerja pendapatan iuran produksi/royalti akibat moderasi HBA. Sementara itu, realisasi Pendapatan SDA Kehutanan tumbuh 15,9% (yoy) antara lain disebabkan pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan (Keterlanjuran Sawit) serta optimalisasi upaya penagihan piutang PNBP sektor kehutanan. Realisasi Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 486,0% (yoy) terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dengan mekanisme Pascaproduksi karena seluruh kapal perikanan telah memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Pascaproduksi, sedangkan periode yang sama pada tahun 2023 merupakan masa transisi perubahan Praproduksi ke Pascaproduksi, sehingga masih banyak kapal yang memiliki SIPI Praproduksi berstatus aktif. Selanjutnya, realisasi Pendapatan SDA panas bumi tumbuh 7,4% (yoy) disebabkan oleh peningkatan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) pada hampir seluruh Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) milik PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) dan Star Energy Geothermal Ltd. (SEG) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan KND mencapai sebesar Rp68,3 triliun (79,6% dari APBN 2024), tumbuh 13,4% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perbankan. Kenaikan dividen ini merupakan dampak dari meningkatnya pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan tahun 2023.

Realisasi PNPB Lainnya mencapai Rp86,2 triliun (74,8% dari APBN 2024), terkontraksi 10,5% (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang terkontraksi 26,9% (yoy) akibat moderasi HBA. Realisasi PNPB K/L juga tercatat mengalami kontraksi 5,1% (yoy) terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan Layanan pada beberapa K/L antara lain Kemenkominfo, Kemenag, serta Kejaksaan. PNPB K/L dari Pendapatan Nonlayanan juga mengalami perlambatan utamanya Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia (BI). Adapun Pendapatan *Domestic Market Obligation* (DMO) pada bulan Juli 2024 telah terdapat realisasi sebesar Rp0,7 triliun (10,5% dari APBN 2024), sementara pada periode yang sama tahun 2023 tidak terdapat realisasi.

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp50,7 triliun (60,8% dari APBN 2024), tumbuh 18,2% (yoy). Pertumbuhan ini disumbang oleh Pendapatan BLU Nonsawit utamanya berasal dari peningkatan Pendapatan Jasa Pengelolaan Dana Pendidikan, Jasa Layanan Rumah Sakit dan Jasa Layanan Perbankan BLU.

Sementara itu, Pendapatan BLU Sawit dari Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) masih mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh turunnya rata-rata harga referensi CPO Kemendag yaitu sebesar US\$811,5/mt pada periode Januari-Juli 2024 (2023: US\$863,8/mt).



Penerimaan Hibah

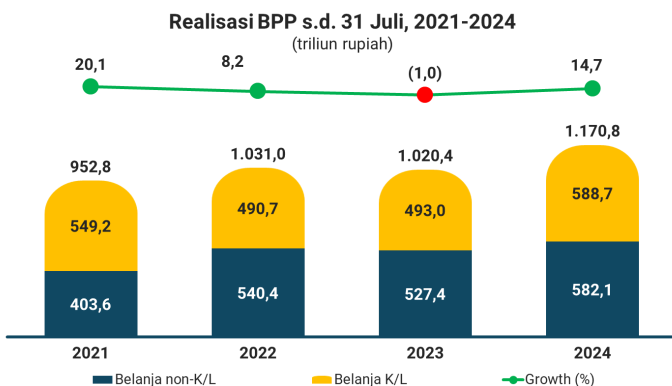
Penerimaan hibah mencapai Rp7,7 triliun, dipengaruhi terutama oleh penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah terutama untuk KPU dan Bawaslu sebagai bentuk dukungan Pilkada 2024.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Juli 2024 mencapai Rp1.638,8 T (49,3% dari APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 T) atau tumbuh 12,2% (yoy). Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.170,8 T (47,5% dari APBN 2024) atau tumbuh 14,7% (yoy) serta Transfer ke Daerah sebesar Rp468,0 T (54,6% dari APBN 2024) atau tumbuh 6,1% (yoy).

Belanja Pemerintah Pusat Utamanya Dimanfaatkan untuk Penyaluran Bantuan kepada Masyarakat, Pelaksanaan Pemilu, Pembangunan Infrastruktur, Pemeliharaan Barang Milik Negara, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri, dan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.170,8 T terdiri dari realisasi Belanja K/L dan Belanja Non-K/L. Realisasi Belanja K/L mencapai Rp588,7 T (54,0% dari APBN 2024) atau tumbuh 19,4% (yoy). Belanja K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, penyaluran BOS, pembangunan infrastruktur, dukungan pelaksanaan Pemilu 2024, serta pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri. Selanjutnya, Realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp582,1 T (42,3% dari APBN 2024) atau tumbuh 10,4% (yoy). Belanja Non-K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.



Adapun penjelasan kinerja Belanja K/L s.d. 31 Juli 2024 berdasarkan jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

Realisasi Belanja Pegawai K/L mencapai Rp177,5 T (62,1% dari APBN 2024) atau tumbuh 14,8% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh kenaikan gaji pokok ASN/TNI/Polri sebesar 8% serta pembayaran THR dan Gaji ke-13 dengan komponen tunjangan kinerja 100%. Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp116,5 T dan komponen tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp61,0 T.

Realisasi Belanja Barang K/L mencapai Rp211,0 T (52,1% dari APBN 2024) atau tumbuh 18,9% (yoy). Peningkatan realisasi tersebut antara lain dipengaruhi kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu tahun 2024 dan penyaluran dana BOS. Selain itu, secara rinci realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pembayaran honorarium dan pengawas Badan *Ad hoc*, pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang/jasa/logistik Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU); (2) pengelolaan barang milik negara (BMN) Matra Darat, Laut, Udara dan Umum Integratif, pengadaan dan pemeliharaan alutsista dan nonalutsista, dan pelayanan kesehatan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan); (3) dukungan logistik/sarpras, pelaksanaan operasi kepolisian, pengembangan perbekalan umum, dan pelayanan keamanan bidang lintas oleh POLRI; (4) penyaluran dana BOS, serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan oleh Kementerian Agama (Kemenag); serta (5) preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, operasi dan pemeliharaan sarpras SDA dan penanggulangan darurat akibat bencana, serta penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp109,3 T (44,2% dari APBN 2024) atau tumbuh 31,7% (yoy) yang dipengaruhi antara lain peningkatan belanja infrastruktur KemenPUPR, dan pengadaan peralatan BIN. Kinerja Realisasi Belanja Modal tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pembangunan/ rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan,

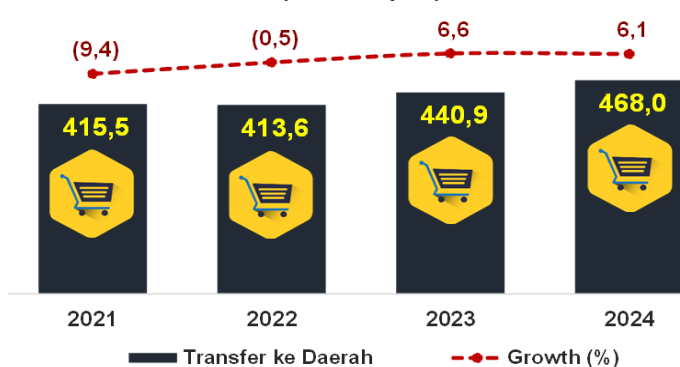
jaringan irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan rumah susun untuk ASN/TNI/Polri oleh KemenPUPR; (2) pengadaan sarana dan prasarana Kemenhan dan Alutsista TNI; (3) pengadaan sarana dan prasarana serta Almitsus Polri; (4) pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan, bandara, serta sarana dan prasarana perkeretaapian oleh Kemenhub; dan (5) pengadaan peralatan BIN.

Realisasi Bantuan Sosial K/L mencapai Rp90,9 triliun (59,7% dari pagu APBN 2024) atau meningkat sebesar 16,5% (yoy) yang antara lain dipengaruhi oleh peningkatan realisasi PIP, KIP Kuliah, PKH, dan Kartu Sembako. Belanja bantuan sosial dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (2) penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,7 juta KPM; (3) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) penyaluran bantuan PIP bagi 11,2 juta siswa dan bantuan KIP Kuliah bagi 875,0 ribu mahasiswa; serta (5) pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.

Adapun penjelasan kinerja Belanja Non-K/L s.d. 31 Juli 2024 dapat disampaikan sebagai berikut. Pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp114,0 T, tumbuh 16,9% (yoy) yang dipengaruhi oleh pembayaran THR dan Gaji ke-13 Pensiunan ASN/TNI/Polri. Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp272,7 T (54,8% dari APBN 2024) atau tumbuh 13,2% (yoy). Kemudian, realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp119,9 T (41,9% dari APBN 2024) atau tumbuh 6,7% (yoy). Realisasi Belanja Subsidi tersebut terdiri atas: (1) Subsidi Energi sebesar Rp86,8 T, untuk penyaluran BBM bersubsidi sebesar 8,7 juta KL, LPG tabung 3 Kg sebesar 4,0 juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi sejumlah 40,7 juta pelanggan; dan (2) Subsidi Non-Energi sebesar Rp33,1 T terutama dimanfaatkan untuk Subsidi Bunga KUR kepada 2,8 juta debitur dan plafon penyaluran KUR sebesar Rp167,3 T, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan untuk 93,0 ribu unit rumah bersubsidi, serta penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 3,8 juta ton. Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp67,6 T (17,4% dari APBN 2024) atau turun 3,2% (yoy), terutama dimanfaatkan untuk pembayaran Kompensasi BBM dan Listrik sebesar Rp61,6 T dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebesar Rp4,5 T bagi 1,3 juta peserta.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) s.d. 31 Juli 2024 Utamanya untuk Dukungan Operasional Pelayanan di Daerah, serta untuk Mendukung Pembangunan secara Inklusif dan Berkelanjutan di Seluruh Daerah

Realisasi Penyaluran TKD s.d. 31 Juli, 2021-2024 (Triliun Rupiah)



Sampai dengan 31 Juli 2024 realisasi penyaluran TKD mencapai Rp468,0 T (54,6% terhadap APBN tahun 2024), lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp440,9 T (54,1% terhadap APBN

tahun 2023). Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dalam memenuhi persyaratan penyaluran TKD.

Penyaluran DBH sampai dengan 31 Juli 2024 telah terealisasi sebesar Rp64,5 T (45,1% terhadap APBN tahun 2024). Realisasi tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 15,9% (yoy) yang terdiri dari realisasi DBH Pajak sebesar Rp18,1 T, DBH SDA sebesar Rp45,1 T, dan DBH Sawit sebesar Rp1,4 T. Realisasi penggunaan DBH di tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh peningkatan alokasi DBH dan sejalan dengan kebijakan DBH *earmarked* untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan.

Realisasi penyaluran DAU sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp264,2 T (61,8% terhadap APBN tahun 2024), lebih tinggi sebesar 16,6% (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp226,6 T (57,2% terhadap APBN tahun 2023). Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran DAU *Block Grant* Rp227,5 T yang utamanya digunakan untuk pembayaran gaji ASN Daerah, serta penyaluran DAU *Specific Grant* sebesar Rp36,7 T (antara lain untuk dukungan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, dan penggajian formasi PPPK daerah).

Realisasi penyaluran DAK sampai dengan 31 Juli 2024 sebesar Rp80,1 T (42,6% terhadap APBN tahun 2024), lebih rendah dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp107,8 T (58,0% terhadap APBN tahun 2023). Realisasi tersebut terdiri atas (1) DAK Fisik sebesar Rp11,3 T; (2) DAK Nonfisik sebesar Rp68,6 T antara lain untuk penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Tunjangan Guru ASND (TPG, Tamsil, dan TKG), dan Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan KB); serta (3) Hibah kepada Daerah sebesar Rp0,2 T.

Realisasi penyaluran Dana Otsus Aceh dan Provinsi-provinsi di Wilayah Papua sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp7,3 T (40,2% terhadap APBN tahun 2024), secara persentase lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7,1 T (41,4% terhadap APBN tahun 2023). Realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kepatuhan pemerintah daerah penerima Dana Otsus dalam menyampaikan dokumen syarat salur secara lengkap dan tepat waktu.

Realisasi penyaluran Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp1,1 T (80,0% terhadap APBN tahun 2024), lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1,09 T (76,7% terhadap APBN tahun 2023). Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan D.I. Yogyakarta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta.

Sampai dengan 31 Juli 2024, realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp48,5 T (68,2% terhadap APBN tahun 2024), lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp40,6 T (58,0% terhadap APBN tahun 2023). Realisasi tersebut termasuk penyaluran BLT Desa sebesar Rp5,3 T bagi 2,53 juta KPM yang tersebar di sekitar 75 ribu desa.

Dana Insentif Fiskal sampai dengan 31 Juli 2024 telah tersalurkan sebesar Rp2,2 T (27,1% terhadap APBN tahun 2024), lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp2,0 T (25,4% terhadap APBN tahun 2023). Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal pada tahun 2024 ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah antara lain untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan dukungan dunia usaha.

PEMBIAYAAN ANGGARAN

Realisasi Pembiayaan Anggaran sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp217,0 T atau 41,5% dari APBN 2024. Realisasi ini mengalami kenaikan 31,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Hal ini terutama diakibatkan oleh kenaikan dalam realisasi pembiayaan utang

Pembiayaan utang sampai dengan 31 Juli 2024 secara neto terealisasi sebesar Rp266,3 T. Realisasi pembiayaan utang tersebut naik 36,6% (yoy) diakibatkan adanya kenaikan realisasi penerbitan SBN (neto).

Selanjutnya, **terkait dengan realisasi pinjaman neto**, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) neto terdapat realisasi sebesar Rp3,7 T yang berasal dari penarikan PDN bruto Rp5,9 T dan pembayaran cicilan pokok PDN sebesar negatif Rp2,1 T. Sementara pada Pinjaman Luar Negeri (PLN) neto terdapat realisasi sebesar Rp9,6 T yang berasal dari penarikan PLN bruto Rp59,3 T dan pembayaran cicilan pokok PLN sebesar negatif Rp49,7 T.

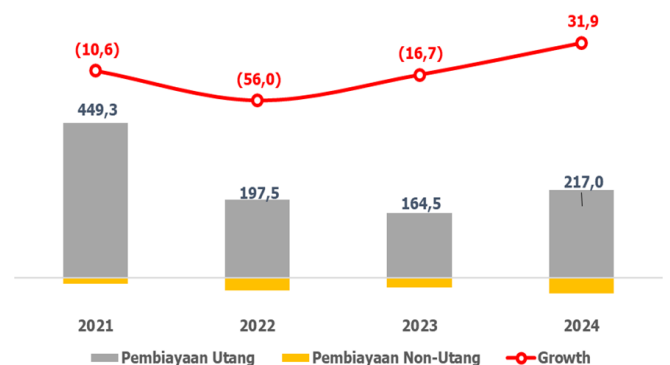
Realisasi pembiayaan investasi sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai sebesar negatif Rp50,1 T. Realisasi tersebut berasal dari investasi kepada BUMN sebesar negatif Rp28,2 T, investasi kepada BLU sebesar negatif Rp15,0 T, investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional sebesar negatif Rp2,0 T, dan Investasi Pemerintah Non-Permanen sebesar negatif Rp8,6 T. Selain itu, terdapat realisasi penerimaan kembali investasi sebesar Rp3,6 T yang berasal dari pembayaran cicilan pokok piutang dana bergulir eks BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebesar Rp0,6 T, Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp2,8 T, pembayaran cicilan pokok Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp0,2 T, dan pengesahan belanja Satuan Kerja Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang berasal dari Dana Rehabilitasi Mangrove sebesar Rp0,04 T.

Sampai dengan 31 Juli 2024 pemberian pinjaman telah terealisasi (neto) sebesar Rp0,3 T. Realisasi tersebut berasal dari realisasi penerusan pinjaman sebesar negatif Rp1,6 T (39,2% dari APBN 2024) dan realisasi penerimaan cicilan pokok penerusan pinjaman sebesar Rp2,0 T (50,6% dari APBN 2024).

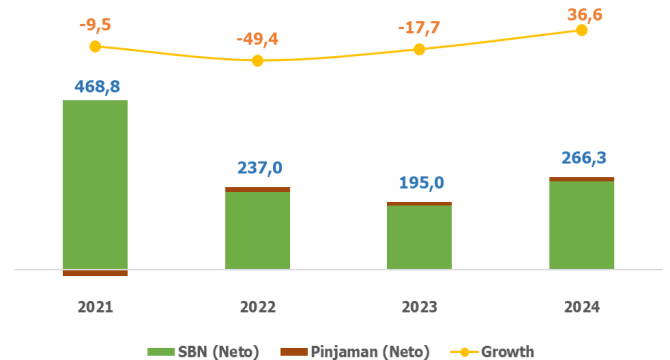
Sementara itu, **alokasi anggaran kewajiban penjaminan sampai dengan 31 Juli 2024 belum direalisasikan** atau dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah, sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya, diantaranya karena mempertimbangkan prioritas realisasi anggaran. Adapun total saldo rekening tersebut saat ini sebesar Rp12,2 T, yang berasal dari pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan tahun-tahun sebelumnya. Rekening tersebut bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi risiko klaim atas jaminan Pemerintah.

Realisasi pembiayaan lainnya sampai dengan 31 Juli 2024 sebesar Rp0,5 T yang berasal dari hasil pengelolaan aset. Hasil pengelolaan aset merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Sedangkan penggunaan SAL sampai dengan 31 Juli 2024 belum direalisasikan mengingat masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencukupi.

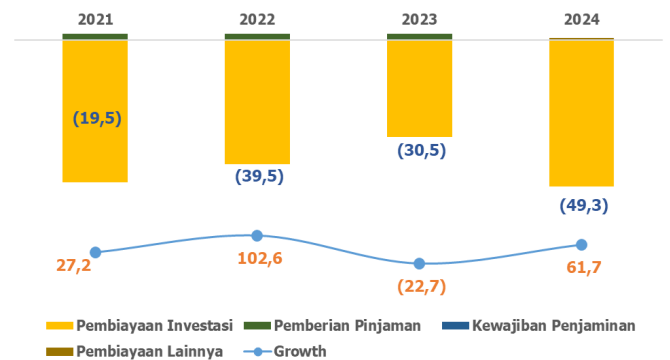
Realisasi Pembiayaan Anggaran s.d 31 Juli, 2021-2024
(triliun Rupiah)



Realisasi Pembiayaan Utang s.d 31 Juli, 2021-2024
(triliun Rupiah)



Realisasi Pembiayaan Non-Utang s.d 31 Juli, 2021-2024
(triliun Rupiah)



EVENT TERKAIT APBN

Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2025

Penyelenggara	:	Direktorat Penyusunan APBN, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Waktu	:	Selasa, 30 Juli 2024
Tempat	:	Live Youtube Ditjen Anggaran
Keynote Speech Narasumber	:	Direktur Jenderal Anggaran
	:	1. Direktur Penyusunan APBN, Ditjen Anggaran 2. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Ditjen Perimbangan Keuangan 3. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran
Moderator	:	Kepala Subbagian Hukum Anggaran, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Peserta	:	Mahasiswa, dosen/akademisi, ASN dari kementerian/lembaga, ASN Pemda, LSM, kalangan masyarakat umum, dll.



Sekilas Pelaksanaan

Sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat dinamis, proses perencanaan dan perumusan RUU APBN TA 2025 membutuhkan banyak perspektif dari kacamata publik, sebagai bahan penyempurnaan sekaligus perwujudan *good governance* dan penguatan partisipasi publik agar semakin lebih kredibel dan transparan. Untuk itu, Kemenkeu menyelenggarakan Konsultasi Publik RUU APBN TA 2025 guna memberikan gambaran dan pemahaman kepada publik terkait pokok-pokok kebijakan APBN TA 2025, dan peran strategis APBN dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hadir sebagai *Keynote Speech* adalah Bapak Isa Rachmatarwata (Dirjen Anggaran), dengan mengundang narasumber Bapak Rofyanto Kurniawan (Direktur Penyusunan APBN), Bapak Jaka Sucipta (Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), dan Bapak Mei Susanto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran). Tak lupa, dalam rangka mendukung semangat Kemenkeu SATU, Ditjen Anggaran bersinergi dengan melibatkan Bapak Johannes Calvin Simanullang dari Biro Hukum, Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai moderator.

KELAS APBN KITA 1

Penyelenggara	:	Direktorat Penyusunan APBN, Ditjen Anggaran dan Politeknik Keuangan Negara STAN
Waktu	:	Selasa, 6 Agustus 2024
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting dan Youtube PKN STAN
Pembukaan	:	Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran dan Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Politeknik Keuangan Negara STAN
Narasumber	:	Baskara Pandam Primawan, Ditjen Anggaran Michael Silalahi, Badan Kebijakan Fiskal
Peserta	:	Pelajar SMA/SMK/MA/Sederajat



Sekilas Pelaksanaan

Pada tanggal 6 Agustus 2024, telah diselenggarakan Kelas APBN Kita 1 yang bertempat di Politeknik Keuangan Negara STAN. Acara ini sekaligus menandakan telah dibukanya lomba Cerdas Cermat 2024 untuk pelajar tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat, yang juga merupakan salah satu cabang dari Olimpiade APBN 2024. Dengan dihadiri oleh lebih dari 300 orang peserta, yang hadir secara langsung maupun lewat daring, acara ini sukses menarik perhatian dan minat dari para pelajar tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat yang ingin memahami APBN secara lebih dalam.

Kelas APBN Kita I dibuka secara langsung oleh Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran dan Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Politeknik Keuangan Negara STAN. Acara tersebut menghadirkan dua orang narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal. Materi yang disampaikan adalah terkait APBN secara umum, baik dari sisi kebijakan maupun fungsi APBN secara lebih luas. Penyelenggaraan Kelas APBN Kita I diharapkan dapat meningkatkan minat para generasi muda sebagai penerus tongkat estafet pembangunan untuk dapat belajar dan memahami APBN dan #UangKita secara lebih dalam dan luas, dan diharapkan pula dengan adanya acara semacam ini, jumlah peserta lomba Cerdas Cermat APBN akan terus meningkat di masa-masa mendatang.